

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun di luar sekolah atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama komite sekolah merupakan nama generik, artinya bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi peran dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komite sekolah (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002).

Dasar hukum utama pembentuk komite sekolah untuk pertama kalinya adalah undang-undang No 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas), Rumusan propernas tentang pembentukan komite sekolah kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 yang merupakan acuan utama pembentukan komite sekolah. Disebutkan sebagai acuan karena pembentukan komite sekolah di berbagai satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan (Anonim, 2003: 3).

Peran serta masyarakat merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah. Agar peran serta masyarakat tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan maka Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.

Secara kualitatif, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Salah satu penyebabnya antara lain karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan tentang kedudukan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Anonim, 2003: iii).

Disamping itu permasalahan yang timbul sekarang ini adalah Komite Sekolah tidak menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan perannya. Antara pihak Komite Sekolah dengan pihak sekolah, jarang mengadakan pertemuan, sehingga hanya ada bukti (data) notulen. Peran Komite Sekolah sangat minim dan Komite Sekolah hanya dicap sebagai tukang stempel.

Kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo masih perlu dioptimalkan, hal ini disebabkan karena manajemen keanggotaan yang belum sepenuhnya terlaksana sehingga proses kegiatan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo juga belum tercapai secara optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja kepada anak didik tetapi juga memberikan pengetahuan tentang pandangan hidup yang baik

dan berguna bagi masa depan peserta didik tersebut. Proses pendidikan harus berorientasi pada siswa. Seperti yang diutarakan oleh Sanjaya (2008: 3) “pendidikan adalah upaya membangun potensi anak didik”.

Karena itu, penyelenggaraan pendidikan haruslah berpihak kepada siswa, dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Zubaedi (2008: 131) yang menyatakan “..... penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Maka, untuk mewujudkan kualitas pendidikan dengan seoptimal mungkin diperlukan tenaga kependidikan yang profesional serta terjalinnya kerjasama antara komponen lembaga pendidikan dengan komite sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya (Haryadi, *et al*, 2006: 25).

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran adalah secara langsung adalah guru (kemampuan/kompetensi, komitmen, konsentrasi), bakat dan motivasi peserta didik, sedangkan yang tidak langsung adalah sarana prasarana, dana, lingkungan, pemikiran dan hal-hal lainnya yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran efektif dan bermutu (Anonim, 2003: 16).

Guru serta sarana prasarana merupakan media yang dapat membantu siswa untuk mempermudah dalam mencapai pemahaman materi yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Jika guru dan sarana dan

prasarana yang ada tidak menunjang aktivitas belajar mengajar maka kurikulum tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Maka, untuk bisa menunjang aktivitas belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, perlu kerjasama yang baik antara komponen sekolah dengan komite sekolah.

Anggota dewan pendidikan dan komite sekolah harus mulai bekerja keras agar terjadi proses pemberdayaan sehingga perlu kerja keras, kerja secara teliti, cermat dan terus menerus. Bagaimana dewan pendidikan dan komite sekolah selalu berada di lingkungan pendidikan, tidak menempatkan diri sebagai pegawai pemerintah, tidak minta dilayani, tetapi lebih maju sebagai motor pembangunan pendidikan (Harsono, 2007: 88).

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan. Dengan demokratisasi pendidikan, sekolah membantu murid dalam menentukan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sekolah membantu murid berdasarkan prestasi akademiknya. Dengan kriteria tersebut sekolah membantu murid dalam menentukan pilihan spesialisasi apa yang akan dipilih (Sutikno, 2007: 28).

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah.

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pembelajaran. Jika kantor cabang dinas pendidikan Kecamatan, dan dinas pendidikan Kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengendalian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah pemberian peran komite sekolah dan dewan pendidikan untuk menentukan apa yang dikerjakan oleh sekolah, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana mengerjakan (Harsono, 2007: 84).

Namun, banyak pihak masih meragukan kinerja komite sekolah. Bahkan, kinerja komite sekolah dianggap masih lemah. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak pihak yang menemukan lemahnya kinerja komite sekolah. Seperti yang diutarakan oleh Muzirman (2007: 1), “masalah pendidikan masih terus menjadi dilema di tengah-tengah masyarakat permasalahan di dunia pendidikan terletak pada lemahnya kinerja komite sekolah, khususnya dalam hal melakukan pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan di sejumlah sekolah”. Kinerja komite sekolah yang buruk dipandang sebagai indikator menurunnya kualitas pendidikan.

Muzirman (2007: 1) menambahkan “banyak sarana dan fasilitas di sejumlah sekolah, khususnya SD tidak memenuhi konsep kenyamanan belajar. Selain itu, lemahnya kinerja komite sekolah juga dapat dilihat dari maraknya uang “siluman” yang masih ada saat ini di sekolah-sekolah”.

Tidak adanya komunikasi yang baik menyebabkan pengawasan yang tidak baik pula. Tidak adanya komunikasi antara komite sekolah dan pihak sekolah menyebabkan tidak optimalnya peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Komite sekolah tidak mampu menjalankan perannya sebagai badan pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), dan sekaligus mengontrol (*controlling*). Kinerja komite sekolah masih variatif. Menurut Suparlan (2007: 2) kinerja komite sekolah masih berada pada kontinum dari “sebagai stempel” sampai “sebagai eksekutor”.

Menurutnya, sebagai lembaga stempel, dewan pendidikan dan komite sekolah sering mendapatkan rapor merah oleh warga masyarakat karena kurang berpihak kepada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga eksekutor, komite sekolah tidak dipandang sebagai mitra sejajar oleh pemerintah daerah. Komite sekolah hanya sebagai “pelaksana” kebijakan yang digariskan oleh pemerintah daerah.

Seharusnya, dengan adanya sinergi antara komite sekolah dan pihak sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Namun, “masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata” (Mardiyono, 2004: 3). Pihak orang tua dan wali murid tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite

sekolah di tiap satuan pendidikan. Sehingga muncul pendapat bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Penerapan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah bahwa kepada sekolah tidak menjadi bawahan dari pemerintah ataupun yayasan, tapi otonom. Kepala sekolah lebih mempunyai keleluasaan, bahkan dalam bidang pembiayaan dan anggaran sekolah.

Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah dalam mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar dan memiliki posisi tawar yang tinggi. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penunjang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dibayarkan.

Begitu pula dengan komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Hingga saat ini kinerja komite sekolah masih belum optimal. Peran komite sekolah juga hanya mencakup bidang pengumpulan dana dan hanya sebagai justifikasi. Peran komite sekolah belum mempunyai arti yang signifikan. Hal ini berdampak pada transparansi dan akuntabilitas sekolah yang saat ini sangat diperlukan semakin sulit dicapai. Adanya permasalahan kinerja komite sekolah pada program pendidikan gratis di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “KINERJA KOMITE SEKOLAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMP NEGERI 1 POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana ciri-ciri peran komite sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo". Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus.

1. Karakteristik organisasi komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Karakteristik jaringan lembaga kerja kepala sekolah dengan warga sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
3. Karakteristik nilai-nilai kerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan subfokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik organisasi komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Mendeskripsikan karakteristik jaringan lembaga kerja kepala sekolah dengan warga sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
3. Mendeskripsikan karakteristik nilai-nilai kerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi komite sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo terkait dengan kinerja kepala sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini akan mempunyai manfaat bagi SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo dalam hal pengoptimalan peran komite sekolah, sehingga akan lebih meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

b. Bagi Komite Sekolah

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagi komite sekolah untuk lebih meningkatkan kinerja dan menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagi masyarakat akan tugas dan fungsi komite sekolah. Serta memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Kinerja komite sekolah adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas yang dilakukan oleh komite sekolah.
2. Program pendidikan adalah perencanaan pendidikan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

3. Komite sekolah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Agar peran komite sekolah lebih efektif dan sesuai acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu sosialisasikan dan selektif dalam pembentukan komite sekolah. Terutama punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, punya komitmen dan konsisten serta mengedepankan pencarian dana dari luar selain orang tua siswa.

4. Peran komite sekolah

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite sekolah diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai patner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang pendidikan bulan Juni 2003 (pasal 56) memberikan kepada komite sekolah dan madrasah peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: nasihat, pengarahan, bantuan personalia, material, fasilitas, dan pengawasan pendidikan.